

Pemilihan Walikota Malang Rasa Korupsi

Unti Ludigdo

Guru Besar Etika Bisnis dan Profesi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Brawijaya

Email : masunti@gmail.com

Abstract

This article aims to dissect Malang's Mayor Election in 2018. In the 2018 Mayor Election, there are two candidate that entangled by corruption plus 41 regional legislature (DPRD). The election that seems full of corruption is occurred when leadership succession at the local level happened, suddenly KPK uncover a corruption that involves many regional government officials. The implication of two candidate that entangled by corruption is that they get negative assessment from the people, while one other candidate received a a profitable cause from that case. As a result, that one candidate successfully became the Mayor of Malang. This phenomena shows that the rationality of the voters. However, at the same time gave a punishment towards candidates that corrupt. This is the rationality of the people who use its political right in determining who leaders that can represent its aspiration.

Keyword : candidates, corruption, and mayor election,

Abstrak

Tulisan ini ingin membedah pemilihan walikota Malang tahun 2018. Pada pemilihan 2018 dua pasangan calon (paslon) yang terjerak korupsi ditambah dengan 41 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pilwali rasa korupsi karena terjadi menjelang pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tiba-tiba KPK membongkar perilaku korupsi yang melibatkan banyak aktor pejabat daerah. Implikasinya dua paslon mendapat penilaian negatif dari masyarakat, sementara satu paslon mendapatkan keuntungan dari kasus korupsi tersebut. Alhasil, paslon tersebut yang terpilih sebagai walikota. Keterpilihan paslon yang tidak korupsi menunjukkan rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, pada saat yang sama memberikan hukuman kepada paslon yang terlibat korupsi. Inilah rasionalitas masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam menentukan siapa pemimpin yang dapat mewakili aspirasinya.

Kata kunci: pasangan calon, korupsi, dan pemilihan walikota

PENDAHULUAN

Kini Malang Raya sudah berada dalam lingkaran korupsi. Berawal dari Kota Batu, Eddy Rumpoko, disusul Walikota Malang M Anton, selanjutnya dipertengahan bulan Oktober 2018 Bupati Malang, Rendra Krisna ditetapkan tersangka KPK. Penetapan Rendra sebagai tersangka korupsi merupakan bukti bahwa Malang Raya sedang berada dalam pusaran korupsi. Praktik korupsi ini terkait erat dengan pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat pada penetapan tersangka korupsi walikota Batu dan walikota Malang menjelang pemilihan, sedangkan penetapan bupati Malang terkait dengan pembayaran utang pilkada. Praktik korupsi yang terjadi di Malang Raya ini menambah deretan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Di antara ketiga daerah tersebut, korupsi yang terjadi di Kota Malang merupakan praktik korupsi yang paling mengejutkan, dimana kasus tersebut tidak hanya melibatkan para kepala daerah atau walikota, tapi juga birokrasi, dan anggota DPRD yang berjumlah 41 orang.

Secara spesifik, tulisan ini berfokus pada fenomena korupsi di Kota Malang yang melibatkan Walikota Malang, M. Anton. Pilihan kasus M Anton didasari oleh tiga pertimbangan. *Pertama*, figur M Anton yang sederhana, religiusitas, dan pengusaha tiba-tiba menyentak hati publik karena berada dalam pusaran korupsi. Kesederhanaan, religiusitas, dan pengusaha ternyata bukan jaminan seorang kepala daerah untuk jauh dari perilaku korupsi. *Kedua*, korupsi yang terjadi di Kota Malang melibatkan banyak orang, yaitu pihak eksekutif, 41 orang anggota legislatif, birokrasi daerah, dan pengusaha. Keterlibatan 41 orang anggota legislatif ini merupakan salah satu kasus korupsi massal terbesar di Indonesia selain Pemerintahan Jambi yang melibatkan 51 anggota legislatif dan Pemerintahan provinsi Sumatera utara sebanyak 38 orang anggota legislatif. Keterlibatan banyak aktor dalam korupsi di Kota Malang menunjukkan permasalahan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Korupsi senantiasa ‘dikutuk dan dibenci’ tetapi secara sadar dilakukan secara berjamaah. *Ketiga*, korupsi yang terbongkar di Kota Malang bertepatan dengan perhelatan pemilihan walikota. Karena itu, nuansa politisnya sangat tinggi.

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan berlakunya kebijakan desentralisasi, praktik korupsi di Indonesia semakin meningkat dan terjadi secara massif di level lokal. Data yang berasal dari KPK di tahun 2019, menyebutkan bahwa, sejak tahun 2008 hingga 2018,

jumlah kasus korupsi dalam pemerintahan sebanyak 91 orang Walikota, 245 orang anggota legislatif, dan 16 orang Gubernur. Permasalahan korupsi dalam pemerintahan daerah tersebut terjadi karena banyak hal. Lemahnya akuntabilitas, salah kelola, dan ketidakefektifan pemerintahan daerah dalam pengelolaan menjadi sebab terjadinya praktik korupsi di dalam pemerintahan daerah (Basri and Nabiha 2016). Prabowo menjelaskan bahwa perilaku korupsi di sektor publik disebabkan oleh skemata individu dan organisasi dalam menafsirkan masalah dan pengalaman yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Prabowo and Cooper 2016). Dalam arena politik, maraknya praktik korupsi yang melibatkan elite politik di level pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional disebabkan oleh desain sistem politik yang disfungsi, terutama terkait dengan sistem pendanaan kampanye (Mietzner 2015). Dengan kata lain, mahalanya ongkos politik telah menjadi salah satu sebab elite terlibat dalam praktik korupsi.

Dalam perkembangan demokrasi di level lokal, korupsi justru terjadi secara terkonsolidasi dimana elite-elite oligarki berperan penting di dalamnya (Moh Fajar SR, 2016;60). Keterlibatan elite di level lokal dalam korupsi ini dilihat sebagai bentuk bekerjanya politik patronase di tingkat lokal (Ratnaningsih Damayanti, 2016; 94). Aktor yang terlibat dalam korupsi kebanyakan adalah kepala daerah, birokrasi, dan DPRD. Pada dasarnya, elit lokal yang korupsi adalah mereka yang memegang tampuk kekuasaan. Dengan kata lain, praktik korupsi dekat dengan relasi kekuasaan itu sendiri (Haboddin 2011). Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk memerangi korupsi hingga level lokal (Bambang Widjojanto 2003). Korupsi di Kota Malang, tentunya, tidak hanya terkait dengan kedudukan, tapi juga kontestasi pemilu mendorong para elite lokal terlibat dalam praktik koruptif.

Mengenal Paslon Pilwali

Pemilihan walikota (pilwali) Malang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam pilwali 2018 terdapat tiga pasangan calon (paslon). Dari tiga pasangan tersebut, urutan pertama adalah pasangan Nanda dan Wanedi. Pasangan ini merupakan salah satu dari keterwakilan kaum perempuan. Yaqub Ananda Gudban adalah politisi dari Partai Hanura. Jabatan sebelumnya adalah wakil rakyat Kota Malang. Nanda-Wanedi yang diusung oleh lima partai politik, yakni PDIP, Hanura, PAN, Nasdem, dan PPP. Koalisi partai politik ini

menunjukkan hilangnya basis ideologi. PDIP, Hanura, dan Nasdem jelas ideologi nasionalis, sedangkan PAN dan PPP berideologi islam. Koalisi pasangan nomor urut 1 menunjukkan perpaduan antara merah-hijau: nasionalis-agama. Pasangan ini mengusung slogan politik *#ayo noto malang#* dan *malang menawan*.

Bila dilihat dari slogannya sebenarnya tidak ada yang baru. Bahkan, sangat umum.

#ayo noto malang# hanya berubah himbauan semata. Nuansanya tidak terlalu politis. Selanjutnya slogan: *malang menawan*. Lagi-lagi tidak menunjukkan pesan kongkrit untuk masyarakat pemilih. Jadi, slogan: *#ayo noto*



malang#, dan *malang menawan*. Tidak memberikan makna apa-apa. Slogan ini hanya berupa informasi yang hampa makna. Slogan ini pula, tidak mampu mengangkat apa yang menjadi persoalan utama Kota Malang. Karena itu, sangat disayangkan.

Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 adalah *incumbent* atau petahana M. Anton dan Syamsul mengusung slogan: *malang apik, teruji, dan terbukti*. Pasangan ini di usung oleh PKB, PKS dan Gerindra. Slogan nomor urut 2 lebih berorientasi kepada diri M. Anton selaku petahana. M. Anton ingin mengatakan lewat slogan politiknya bahwa di bawah kepemimpinnya Kota: *malang apik, teruji, dan terbukti*. Slogan yang sangat subjektif ini kembali menimbulkan tanya. Apanya malang yang apik selama dipimpin M Anton. Selanjutnya, M Anton memang teruji dan terbukti dalam kapasitas apa. Sebagai walikota 'iya'. Tetapi, kehadirannya sebagai pemimpin yang merakyat dan berpihak kepada masyarakat Kota Malang belum tentu diaminin oleh penduduk Kota Malang.

Sekalipun, pasangan nomor urut 2 adalah petahana, namun slogan politiknya tidak menunjukkan sebuah kinerja yang dijual kepala pemilih. Sejatinya, pasangan ini menjual apa yang sudah dikerjakan selama memimpin. Tetapi yang terpasang dalam baliho: *Malang*

Apik! #Malang Asik. # Malang Apik [lihat baliho]. Semua slogan ini sangat normatif dan sulit untuk diterangkan ketika petahana ini berkuasa kembali. Petahana ini juga diusung melalui koalisi PKB, PKS, dan Gerindra. Paslon ini lagi-lagi memperlihatkan betapa cairnya partai islam PKB dan PKS berkoalisi dengan Gerindra yang nasionalis.

Sedangkan pasangan nomor 3 adalah Sutiaji dan Sofyan Edy Sujarwoko. Sutiaji dan M Anton adalah petahana. Pada pilkada sebelumnya, Sutiaji adalah wakil dari M Anton. Pada pilwali 2018 Sutiaji dan M Anton pecah kongsi. Fenomena pecah kongsi pejabat daerah seringkali terjadi dalam kepolitikan Indonesia. Pecah kongsi menunjukkan semangat perburuan kekuasaan menjadi tren baru dalam politik lokal (*Kompas*, 27/3/2012). Berita *Kompas* ini begitu pas untuk disematkan oleh figur Sutiaji dan M Anton. M. Anton maupun Sutiaji sedang berada dalam pusaran pertempuran untuk mempertahankan kembali kekuasaan yang selama ini. Posisi antara M. Anton maupun Sutiaji sejajar dalam pilwali 2018. Mereka bisa memuat klaim yang menguntungkan pasangannya masing-masing.

Pasangan Sutiaji dan Sofyan Edy Sujarwoko diusung oleh Golkar dan Demokrat. Secara ideologi kedua partai politik sama, yakni nasionalis. Ada pun slogan politiknya: *Malang SAE*. Lagi-lagi slogan ini sangat abstrak untuk masyarakat Kota Malang. Jadi, pada intinya, ketiga pasangan ini memiliki kesamaan yakni slogan politik yang sangat abstrak, sehingga sangat sulit untuk dimintai pertanggungjawaban bila kelak terpilih menjadi walikota. Dengan mengikuti logika tersebut, maka slogan politik sengaja dibuat agar walikota terpilih bisa menghindari dari tuntutan masyarakat.

Terlepas dari penjelasan slogan yang abstrak, namun satu hal pasti bahwa pilwali Kota Malang memberikan gambaran betapa pragmatisnya partai politik dalam mengusung paslonnya. Nalar untuk berkuasa jauh lebih tinggi ketimbang pertimbangan ideologi. Kondisi ini mengingatkan kita soal adigium klasik ilmu politik bahwa tidak ada lawan abadi yang ada hanya kepentingan abadi. Perbedaan ideologi bukanlah masalah penting sejauh kepentingan politik, hukum, dan ekonomi pejabat terlindungi. Politik telah kehilangan maknanya yang luhur dan cenderung direduksi menjadi siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana kekuasaan itu didapatkan [*Kompas*, 27/3/2012].

Paslon Rasa Korupsi

Dimana-mana di negeri ini pilwali atau pilkada terkadang disambut keriang dan kegembiraan oleh masyarakat. Pilkada atau pilwali adalah pesta rakyat. Sebagian masyarakat memahami pilkada atau pilwali dengan pawai, kampanye akbar dengan dangdutan, hingga pemberian uang kepada pemilih (Muhtar Haboddin, 2016;167). Namun, kegembiraan menyambut pilwali 2018 di Kota Malang terinterupsi melalui kabar yang tidak sedap menimpa paslon. Kabar yang kurang mengesankan itu disematkan kepada paslon nomor urut 2 yakni M. Anton dan paslon nomor urut 1 yakni Nanda. Kedua pasangan ini terindikasi korupsi. Berita ini tentu, menyentak kesadaran pemilih, politisi, partai politik pengusung, pengamat politik, dan masyarakat sipil. Isu korupsi yang melibatkan pasangan nomor urut 2 dan 1 menggemparkan jagat kepolitikan di Kota Malang. Langit Kota Malang mendung. Kerisauan terjadi tidak hanya pasangan calon, tetapi juga lembaga legislatif dan birokrasi berada dalam pusaran korupsi.

Artinya, korupsi yang terjadi di Kota Malang tidak hanya melibatkan pasangan calon, tetapi melebar ke lembaga legislatif dan birokrasi. Karena melebar ke lembaga legislatif, maka Nanda pasangan nomor 1 adalah salah satu dari 41 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan tersangka dan sekarang posisinya sudah berkekuatan hukum tetap dengan vonis pengadilan (Unti Ludigdo dkk, 2018). Jadi, baik paslon 1 maupun 2 sama-sama berada dalam pusaran korupsi. Apa yang terjadi di Kota Malang sebenarnya bukanlah hal baru dalam konteks pemilihan kepala daerah. sebelumnya, yakni tahun 2017 mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko tertangkap disaat istrinya sedang berjuang pemilihan. Bahkan, disjumlah daerah kandidat walikota, bupati, maupun gubernur tertangkap pada saat berencana ikut pemilihan kepala daerah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Terjerat korupsi menjelang pemilihan kepala daerah

Nama	Daerah	Keterangan
Siti Masitha S	Kota Tegal	Berencana mengikuti pilwali Tegal
Taufiqurrahman	Kab Ngajuk	Istrinya berencana mengikuti bupati
Masud Yunus	Kab Mojokerto	berencana mengikuti bupati
Rita Widayarsi	Kab Kutai Kertanegara	berencana mengikuti pemilihan gubernur

Eddy Rumpoko	Kota Batu	Tertangkap saat istrinya maju menjadi walikota
Sukiman Azmy	Kab Lombok Timur	Bakal calon Bupati Lombok Timur
M. Anton	Kota Malang	Pasangan Calon Walikota
Yaqub Ananda Gudban	Kota Malang	Pasangan Calon Walikota
Rendra Kresna	Kab Malang	Korupsi sesudah terpilih kembali

Diolah dari banyak sumber

Tabel 1 memperlihatkan tiga hal. *Pertama*, fenomena tertangkapnya pasangan calon justru terjadi menjelang pemilihan berikutnya. Itulah yang terjadi Kota Tegal, Nganjuk, Mojokerto, Lombok Timur, dan Kota Malang. Hal ini mengindikasikan hasil korupsi yang mereka lakukan untuk membiayai proses pemilihan kepala daerah. Khusus, Kota Batu tertangkapnya Eddy Rumpoko juga ditengarai untuk membiayai politik istrinya. Jadi, bisa disimpulkan korupsi yang dilakukan untuk biaya pemilihan kepala daerah. Hal ini menjelaskan bahwa paslon-paslon tersebut tidak cukup dikenal masyarakat, sehingga untuk mendapatkan suara pemilih mereka harus memberikan atau membagi-bagikan uang. Untuk menguatkan cara kerja politik uang dalam pilkada/pilwali bisa disimak tabel 2.

Tabel 2. Aktor dan sasaran politik uang

Aktor politik	Sasaran politik uang
Pasangan calon	Warga pemilih
Tim sukses	Penyelenggara pilkada
Donatur	Partai politik
Tokoh politik	Tokoh masyarakat
Tokoh masyarakat	Media massa

Muhtar Haboddin, 2016;182

Perilaku paslon yang menebarkan uang dalam pilkada/pilwali menunjukkan bahwa selama menjadi pemimpin mereka menjaga jarak dengan rakyat (Dawam Raharjo, 1997;9). Sedangkan A. Rahman Tolleng (1982;55) menyebutnya sebagai pemimpin yang mengambang. Jenis pemimpin yang berjarak dan pemimpin mengambang tumbuh-subur

di tanah air. Sebagian dari mereka adalah produk politik Orde Baru. Mereka tumbuh dalam iklim politik yang tidak kenal istilah kompetisi. Jadi, ketika mereka memasuki arena politik pemilihan yang ada dibenaknya dalam mendekati massa pemilih adalah istilah ‘jor-joran’ yang konotasinya tentu tidak enak (Dawam Raharjo, 1997;165).

Kedua, fenomena ini juga bisa dibaca dari segi geografis. Maksudnya, fenomena paslon rasa korupsi menyebar kesejumlah wilayah di Indonesia. Ada di pulau Jawa, pulau NTB, dan Kalimantan. Meskipun demikian, yang dominan kita dapatkan informasinya ada di pulau Jawa. Hal ini pula menunjukkan terjadinya paslon rasa korupsi berjamaah atau desentralisasi paslon rasa korupsi.

Ketiga, paslon rasa korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dikatakan demikian, karena mayoritas pelakunya adalah pejabat petahana yang ingin mempertahankan kekuasaan untuk kedua kalinya atau yang ingin memberikan kekuasaannya kepada istrinya. Hal ini sangat naluriah karena setiap penguasa berkepentingan untuk melestarikan kekuasaannya (Muhtar Haboddin, 2017;186). Dalam usaha mempertahankan kekuasaan itu para paslon tersebut, menggunakan jabatannya untuk korupsi (Unti Ludigdo, 2018;4). Jabatan adalah instrumen untuk mendapatkan kekayaan. Inilah yang sedang dirayakan oleh beberapa kepala daerah. Mereka memahami jabatan sebagai bagian dari akumulasi kekayaan. Implikasinya adalah sejumlah kepala daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Data yang dilansir detik.com menyebutkan beberapa kepala daerah di OTT pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kepala Daerah yang di OTT 2018

Partai Politik	Nama	Keterangan
Partai Nasdem	Mustafa	Bupati Lampung Tengah
	Rivano Muchtar	Bupati Cianjuar
PAN	Adriatma Dwi Putra	Wali Kota Kendari
	Zainuddin Hasan	Bupati Lampung
Partai Demokrat	Remogo Yolando Berutu	Bupati Pakpak Bharat
Partai Perindo	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan

Partai Berkarya	Abdul Latief	Bupati Hulu Sungai Tengah
Nanggroe Aceh	Irwandi Yusuf	Gubenrnur Aceh
PDIP	Marianus Sae	Bupati Ngada
	Abu Bakar	Bupati Bandung Barat
	Agus Feisal Hidayat	Bupati Buton Selatan
	Tasdi	Bupati Purbalingga
	Samanhudi Anwar	Walikota Blitar
	Syahri Mulyo	Bupati Tulungagung
	Pangonal Harahap	Bupati Labuhanbatu
	Sunjaya Purwadisastra	Bupati Cirebon
Partai Golkar	Nyono Sihaldi W	Bupati Jombang
	Imas Aryumningsih	Bupati Subang
	Meriah Ahmadi	Bupati Bener
	Setiyono	Walikota Pasuruan
	Neneng Hassanah Y	Bupati Bekasi

Detik.com, diakses 18/1/2019

Tabel 3 menginformasikan bahwa PDIP yang paling banyak kadernya yang kena OTT. Fenomana ini sangat ironis. Dikatakan ironis karena justru presidennya dari PDIP yang sedang berjuang memberantas korupsi, namun teman separtainya sendiri yang paling banyak kena OTT. Peringkat kedua ditempati oleh Golkar, yakni 5 kadernya yang di OTT oleh KPK. Sementara Nasdem dan PAN masing-masing 2 kadernya yang di OTT. Empat partai lainnya masing-masing 1 orang. Ada pun partai politik yang bebas OTT pada tahun 2018 adalah Hanura, Gerindra, PKB, PKS, dan PPP.

Keterlibatan partai politik dalam pusaran korupsi menimbulkan pesimistik dalam masyarakat perihal pertumbuhan demokrasi di tingkat lokal. Partai politik sebagai institusi demokrasi sekaligus tempat pengkaderan pemimpin politik memberikan contoh yang buruk terhadap pendidikan politik masyarakat. Partai politik gagal menjalankan fungsinya. Penjelasan ini diperkuat laporan Kompas (23/12/2013), yang menyebutkan penilaian negatif masih terus melakat di tubuh partai politik. Menurut publik, hampir-hampir tidak

ada fungsi yang saat ini dijalankan dengan benar oleh parpol. Akibatnya, lebih dari separuh publik berniat mengubah pilihan politiknya pada saat pilkada.

Korupsi menguntungkan Pasangan Sutiaji

Korupsi yang melibatkan pasangan nomor 1 dan 2 memberikan ruang besar kepada pasangan nomor 3, yakni pasangan Sutiaji. Meskipun, sejumlah lembaga survei tidak pernah memberikan nilai baik terhadap pasangan Sutiaji. Namun, keterlibatan korupsi pasangan M Anton dan pasangan Nanda memberikan peluang kepada Sutiaji untuk memenangkan pertarungan dalam pilwali 2018. Hal ini paralel dengan temuan Unti Ludigdo dkk (2018;67);

isu korupsi merupakan isu paling berpotensi menurunkan angka kepercayaan masyarakat. Karena berdasarkan hasil survei, masyarakat cenderung menginginkan serta memilih calon pemimpin yang jujur, selain dekat dengan rakyat. Isu korupsi, sangat cepat menurunkan angka elektabilitas. Apalagi ini momennya Pilkada dan akan fatal jika memang mereka terlibat

Temuan di atas memberikan sinyal kuat atas kemenangan secara moral terhadap pasangan Sutiaji. Masyarakat ingin pemimpin Kota Malang bersih dari korupsi. Secara legal-formal, hanya pasangan Sutiaji yang tidak tersangkut korupsi. Karena itu, ketika pilwali digelar, masyarakat Kota Malang memilih pasangan Sutiaji. Hal ini menunjukkan rasionalitas masyarakat pemilih di satu sisi, sementara pada sisi yang lain menguntungkan paslon nomor 3 yang bersih dari hukum (*Jawa Pos*, 29/6/2018). Faktanya memang demikian, paslon 3 yang terpilih sebagai Walikota Malang.

Kemenangan paslon nomor 3 bisa dibaca sebagai bentuk menghukum pasangan nomor urut 1 dan 2 yang terlilit dengan persoalan korupsi. Menghukum paslon dengan tidak memilih pada pilwali merupakan bentuk pilihan rasional pemilih. Meskipun hukuman belumlah cukup. Sebagaimana dikatakan koordinator MCW, Fahrudin (*Wawancara*, 5/9/2018) tetapi membongkar korupsi hingga, keakar-akarnya sangat penting. KPK jangan sampai meninggalkan sedikit pun penyakit korupsi dalam tubuh pemerintahan Kota Malang. Harapan ini merupakan suara dari masyarakat Malang yang menginginkan agar tercipta sebuah pemerintahan yang bersih dan amanah.

Pilkada di Kota Malang benar tercederai oleh perilaku elit politiknya. Elit politik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat terjerumus dalam perilaku korupsi. Pilkada yang sejatinya menjadi ajang pesta demokrasi berubah menjadi geheran politik. Implikasinya dari perilaku korupsi berdampak tiga hal. *Pertama*, citra pemerintahan Kota Malang menjadi buruk. Citra ini merupakan pukulan, baik pemerintahan daerah maupun masyarakat Kota Malang. Mereka harus menanggung dosa politik yang diperbuat oleh kaum politisi. Karena itu, tidak salah bila ada yang berkomentar dengan nada sinis: Malangnya Kota Malang.

Kedua, partai politik harus bertanggungjawab (*Wawancara*, Jupri, 20/9/2018) atas perilaku yang dilakukan oleh kadernya. Dua pasangan paslon yang terlibat korupsi merupakan tanggungjawab partai politik. Alasannya sangat jelas, yakni pintu masuk dalam pilwali melalui partai politik. Baik M Anton maupun Nanda adalah kader partai politik. Karena itu, partai politik harus bertanggungjawab dan jangan lepas tangan. Partai politik memiliki kewajiban moral untuk meminta maaf kepada masyarakat Kota Malang.

Tiga, budaya rasa malu perlu di bangun dalam kepolitikan Kota Malang (*wawancara*, Bramuntyo Tri Asmoro, 19/8/2018). Budaya malu untuk tidak melakukan korupsi perlu dimiliki oleh semua paslon dan politisi pada umumnya di Kota Malang. Jika paslon dan politisi memiliki rasa malu, maka sudah bisa dibayangkan perilaku korupsi tidak akan hadir di Kota Malang. Harapan ini sah-sah saja. Namun, fakta berkata lain. Aktor politik lokal ternyata tidak mendukung demokrasi secara maksimal. Salah satu ukurannya adalah ketika paslon menjadi bagian dari perilaku korupsi. Karena itu, kita tidak perlu berharap banyak pada politisi dalam menggerakkan demokratisasi lokal. mereka sangat sibuk dengan aktivitas yang memperjuangkan kepentingan dan kekuasaannya, sehingga ketika kekuasaan itu didapat, mereka lebih memikirkan nasibnya sendiri daripada nasih daerah dan rakyatnya. Politik transaksional selama pilkada membuat pemimpin daerah kehilangan spirit memajukan daerah (Siti Zuhro, 2011;178) dan membersihkan dari perilaku korupsi.

Inilah tantangan terberat bagi pasangan terpilih. Sutiaji selaku Walikota Malang harus mampu membersihkan Kota Malang dari perilaku korupsi. Dengan demikian, maka

kepercayaan masyarakat terhadap Sutiaji bisa terbangun. Dalam artian, Sutiaji berbeda dengan M. Anton. Semoga ***

Daftar Pustaka

- Basri, Hasan, and A K Siti Nabihah. (2016). "Accountability of Local Government: The Case of Aceh Province, Indonesia." *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance* 3 (1).
- Damayanti, Ratnaningsih. 'Korupsi dan Patronase' dalam Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, dan Joko Purnomo [ed]. 2016. *Memahami Kompleksitas Korupsi*. Malang, Fisip Press.
- Fajar SR, Moh. 'Politik Lokal Predatori dan Korupsi di Daerah' dalam Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, dan Joko Purnomo [ed]. 2016. *Memahami Kompleksitas Korupsi*. Malang, Fisip Press.
- Laporan Pertanggungjawaban MCW Malang 2017.
- Haboddin, Muhtar, (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang, UB Press.
- Haboddin, Muhtar, (2016). *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Malang, UB Press.
- Haboddin, Muhtar. (2011). 'Kekuasaan dan Korupsi di Tingkat Lokal' *Jurnal Interaktif*, Vol.4 No.2.
- Ludigdo, Unti (2018). 'Korupsi di Perguruan Tinggi' *Jurnal Transformatif*, Vol.4 No.1 Maret.
- Ludigdo, Unti, Laode Machdani, Muhtar Haboddin. (2018). *Runtuhnya Etika Pemerintahan*. Penelitian-Fisip UGM.
- Mietzner, Marcus. (2015). "Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia." *Critical Asian Studies* 47 (4). Taylor & Francis:587–610.
- Prabowo, Hendi Yogi, and Kathie Cooper. (2016). "Re-Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses." *Journal of Financial Crime* 23 (4). Emerald Group Publishing Limited:1028–62.
- Purnomo, Joko. 'Korupsi dan Sistem Pengelolaan Kekuasaan' dalam Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, dan Joko Purnomo [ed]. 2016. *Memahami Kompleksitas Korupsi*. Malang, Fisip Press.
- Raharjo, Dawam, (1997). *Reformasi Politik*. Jakarta, Intermedia.
- Tolleng, Rahman. (1982). 'Otoriterisme Birokrasi melahirkan Pemimpin Pengambang', *Prisma*, No.6 Juni.

Widjojanto, Bambang. (2003). 'Menggagas Gerakan Sosial Anti-korupsi' Makalah disampaikan di PP Muhamadiyah. 5 Agustus.

Zuhro, Siti, (2011). *Model Demokrasi Lokal*. Jakarta. The Habibie Center.

Kompas, 27/3/2012

Kompas, 23/12/2013

Jawa Pos, 29/6/2018.

Wawancara, Jupri, 20 September 2018

Wawancara, Bramuntyo Tri Asmoro, 18 Agustus 2018

Wawancara, Fakruddin, 5 September 2018